

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah berusaha untuk meletakkan dasar bagi adanya suatu sistem pendidikan nasional berdasarkan pada amanat yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan memiliki peranan yang pokok sebagai proses yang kompleks dan berkelanjutan bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berkembang secara individu dan sosial. Marimba (dalam Lesmana, 2018, hlm. 212) menuliskan adagium yang menuturkan bahwa dalam setiap tindakan harus memiliki orientasi atau tujuan yang berfungsi sebagai standar untuk mengakhiri usaha dan agar kegiatan dapat berfokus pada apa yang dicita-citakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 (UUSPN No. 20 tahun 2003) bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu jawaban yang diperlukan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat serta sebagai langkah untuk meletakkan dasar pembangunan negara. Gagasan yang dikembangkan oleh Aristoteles menjelaskan bahwa tujuan pendidikan harus berbanding lurus dengan tujuan pembentukan negara dan penyusunan konstitusi guna mencapai masyarakat yang dapat mengembangkan dan menjalankan kebajikan manusia yang terbaik serta membuka kemungkinan untuk menjalani kehidupan yang ideal (Curren, 2010, hlm. 552).

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mereformasi pendidikan agar sesuai dengan kepentingan nasional. Seperti yang telah dituliskan Tilaar (1995, hlm 70-71) bahwa beberapa bulan

setelah kemerdekaan Ki Hajar Dewantara mengeluarkan “intruksi umum” untuk membuang sistem pendidikan kolonial dan mengubahnya menjadi sistem pendidikan yang demokratis dan mengutamakan patriotisme. Dijelaskan pula oleh Fadli dan Kumalasari (2019, hlm. 158) bahwa pada masa itu dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang salah satu tugasnya adalah untuk mengarahkan bentuk dan pelaksanaan pendidikan nasional, kemudian pada 29 Desember 1945 hasil kerjanya diserahkan kepada kementerian pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, dengan demikian Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 menjadi landasan falsafah pendidikan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan betapa nilai merupakan hal yang paling mendasar bagi sebuah negara sehingga menjadi suatu keharusan untuk mengakomodasi pengajaran nilai dalam sistem pendidikan dan kebijakan publik.

Seperti yang telah diketahui bahwa kondisi Indonesia pasca kemerdekaan mengalami beberapa gejolak baik secara fisik maupun politik. Hal tersebut terjadi karena Belanda yang kembali ingin menguasai Indonesia. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya melalui hasil Konferensi Meja Bundar pada November 1949, kebijakan pendidikan nasional yang digunakan pada masa itu berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 pasal 30, antara lain: (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, (2) Memilih pengajaran yang diikuti adalah bebas, (3) Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang (Aisy, & Hudaidah, 2021, hlm. 574). Kemudian komite pendidikan yang dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang (RUU) membahas kembali undang-undang mengenai pendidikan dan pengajaran, hasilnya undang-undang pendidikan nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah pun diundangkan dan oleh pemerintah diundangkan kembali menjadi undang-undang nomor 12 tahun 1954 (Datumala, 2020, hlm 58).

Sebuah masyarakat dibentuk oleh berbagai faktor atau unsur yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk karakteristik dan identitas. Oleh karena itu, kondisi sosial dan politik akan mempengaruhi perkembangan dan pola dinamika pendidikan nasional. Dijelaskan oleh

Syahrudin dan Susanto (2019, hlm. 63) bahwa di masa awal kemerdekaan kondisi sosial dan politik yang tidak stabil menyebabkan terjadinya beberapa kali perubahan pada arah dan orientasi pendidikan, yang mana tujuan pendidikan saat itu adalah untuk menanamkan semangat patriotisme dan kebangsaan. Namun pada perkembangan selanjutnya, Yamin (2009, hlm. 88) menjelaskan bahwa politik Soekarno kemudian berkembang menjadi sarat akan sosialisme dan hal tersebut turut berpengaruh kepada pendidikan yang dijadikan sebagai alat akselerasi masyarakat untuk mencapai keadilan di semua kalangan. Pendidikan kerap dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat karena mudah untuk mencapai banyak orang dalam satu waktu melalui lembaga formal dan kurikulum yang terstruktur. Sebagai langkah yang lebih jauh lagi adalah dengan menyisipkan ide-ide yang dimaksud dalam buku-buku teks yang digunakan di lembaga pendidikan seperti sekolah.

Buku teks merupakan media yang lazim digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk menyampaikan dan menanamkan ide-ide kebangsaan atau semangat nasionalisme karena perannya yang sentral sebagai sumber pembelajaran. Dengan demikian pula, buku teks sering dianggap sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat. Secara umum buku teks adalah buku yang digunakan sebagai sumber informasi standar tentang subjek mata pelajaran tertentu. Masnur Muslich (2010, hlm. 24) menerangkan buku teks atau buku pelajaran berisi mengenai uraian tentang mata pelajaran tertentu yang disusun secara sistematis yang telah diseleksi untuk tujuan tertentu baik sebagai orientasi pembelajaran atau perkembangan siswa. Luke (1988, hlm 28-29) menjelaskan bahwa teks bukan hanya sekedar sistem yang digunakan untuk menyampaikan fakta, pengalaman tertulis dan pengetahuan, di balik itu teks dirancang dan ditulis oleh orang-orang dengan tujuan tertentu, yang isinya merupakan simultan atas hasil kegiatan politik, ekonomi, dan budaya yang berlangsung. Maka dari itu, boleh dikatakan buku teks merupakan cara yang digunakan oleh pemerintah sebagai kontrol sosial masyarakat berdasarkan pada peranannya dalam menentukan nilai yang dianut serta membentuk persepsi masyarakat mengenai berbagai isu

sosial dan politik. Seperti yang dituliskan oleh Hein dan Selden (1998, hlm.3) bahwa buku teks dijadikan salah satu cara terpenting yang mana gagasan mengenai bangsa, kewarganegaran, masa lalu dan masa depan yang dijanjikan dapat diartikulasikan dan disebarluaskan.

Salah satu subjek mata pelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dalam membentuk semangat nasionalisme adalah sejarah. Melalui sejarah peserta didik diajarkan untuk memahami perjuangan dan pencapaian suatu bangsa untuk membangun sebuah negara. Kartodirjo (1993, hlm. 59) menerangkan bahwa sejarah merupakan bentuk penggambaran pengalaman kolektif antar-generasi yang menjadi landasan untuk menentukan identitas suatu kelompok. Karena pada dasarnya negara adalah bentuk organisasi yang menyatukan berbagai kelompok dengan berbagai latar belakang, benar kiranya sejarah dijadikan sebagai landasan untuk menanamkan konsep nasionalisme kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, pokok ajaran yang memberikan nilai akan semangat nasionalisme dapat dikemas menjadi sebuah ideologi karena ideologi dipandang sebagai suatu hal yang dapat memberikan dampak pada orang-orang baik pada bidang politik, sosial, maupun budaya. Apple (2000, hlm. 42-43) menjelaskan bahwa budaya adalah cara hidup suatu masyarakat yang mengembangkan makna, di mana prosesnya terjadi secara konstan dan kompleks. Itulah mengapa arah kebijakan pendidikan selalu berkaitan dengan politik, mereka terkait melalui sistem nilai dan hubungan kekuasaan.

Schissler dan Soysal (dalam Korostelina, 2008, hlm.25) mengemukakan bahwa pengajaran tentang sejarah tidak hanya menjabarkan mengenai masa lalu kolektif, tetapi juga memainkan peran utama dalam pembentukan masyarakat, pun memberikan makna terhadap kondisi saat itu, karena sejarah dalam kurikulum biasanya mendukung legitimasi pemerintahan yang berlangsung, maka dari itu rekonstruksi sejarah dibuat dengan narasi linear yang dapat membangkitkan semangat. Berdasarkan pada gagasan tersebut maka suatu hal yang wajar bila pemerintah secara khusus mempersiapkan narasi yang akan dituliskan pada buku-buku teks yang diedarkan di lembaga-lembaga pendidikan guna memperoleh hasil yang diharapkan. Begitu pula dengan yang dikatakan

oleh Nieuwenhyuse dan Valentim (2018, hlm.2) bahwa pemerintah melalui otoritasnya mencoba untuk menciptakan ingatan kolektif budaya dan politik agar sesuai dengan identitas nasional. Namun, dalam hal ini kiranya penting agar buku teks memperhatikan keberagaman dan pluralitas yang ada di masyarakat supaya tidak menimbulkan hasil yang diluar harapan. Pada penulisan sejarah penting untuk mewujudkan keseimbangan peran semua kelompok masyarakat atau agama tanpa melebih-lebihkan fakta yang ada, guna memastikan bahwa buku teks itu dapat mencerminkan nilai-nilai nasional yang seimbang, akurat, dan menghargai keberagaman.

Penulisan buku teks sejarah merupakan bagian dalam sejarah perkembangan historiografi di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan telah ada kesadaran untuk menuliskan sejarah yang dapat mencerminkan jati diri bangsa. Sebagaimana yang diterangkan Ali (dalam Hakim, 2018, hlm. 72) bahwasannya pada awal kemerdekaan hadir sebuah polemik dimana buku-buku sejarah yang ditulis pada saat itu menggunakan sumber yang sama yaitu buku Sejarah Hindia-Belanda karya A.J. Eykman dan F.W. Stapel. Hal ini menjadi problem karena tidak sesuai dengan tujuan pengajaran sejarah itu sendiri yaitu untuk menumbuhkan kesadaran nasional. Darmawan (2019, hlm.3) menerangkan bahwa buku yang diterbitkan di awal kemerdekaan tidak memuaskan bagi kepentingan pendidikan kebangsaan Indonesia karena buku yang bersumber kepada sejarah Belanda tidak dapat membangun semangat nasionalisme.

Sebagai jawaban atas permasalahan yang terjadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah inisiatif dengan mengadakan Seminar Sejarah Nasional yang untuk pertama kalinya pada tahun 1957 di Yogyakarta, diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada dan Universitas Indonesia pada tanggal 14 sampai 18 Desember. Kuntowijoyo mengatakan bahwa upaya tersebut dianggap sebagai titik tolak kesadaran sejarah baru, dimana menjadi awal dari historiografi modern Indonesia (2003, hlm.1). Dalam salah satu hasil kajian seminar tersebut membahas mengenai kebutuhan besar akan buku teks sejarah Indonesia yang digunakan di sekolah-sekolah rendah agar sesuai dengan jiwa nasional pada masa tersebut (Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan

Kebudayaan Indonesia, 2017, hlm.18). Seminar ini menjadi titik awal dalam perubahan penulisan sejarah Indonesia dari yang semula bersifat Neerlandosentris menjadi Indonesiasentris. Dengan demikian, penggunaan buku teks sejarah yang berisi gagasan akan semangat kebangsaan mulai masif digunakan.

Telah banyak penelitian yang mengangkat buku teks sebagai objeknya, dan lingkup penelitian mengenai hal ini begitu luas dan beragam. Wiater (dalam Fusch dan Bock, hlm. 58) mengidentifikasi beberapa area fokus penelitian buku teks: sebagai bagian dari penelitian yang berkenaan dengan sejarah budaya, sebagai bagian dari penelitian media, sebagai pandangan khusus *subject-specific*, sebagai penelitian analisis teks, dan sebagai bagian dari penelitian sumber sejarah. Pada lingkup sejarah pendidikan, buku teks merupakan objek peninggalan yang dapat memberikan petunjuk akan kenyataan yang berlangsung pada saat di mana buku tersebut digunakan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa konteks yang dituliskan didalamnya merupakan hasil kontruksi yang telah ditentukan oleh lembaga yang berkuasa untuk mendukung dan memperkuat sistem kenegaraan yang tengah berlangsung. Sebagaimana yang dikatakan oleh Apple (dalam Lucy dkk, hlm. 2) bahwa buku teks begitu penting dalam penelitian pendidikan karena hal itu mewakili “kurikulum yang dimaksudkan,” yang mana posisinya berada pada persimpangan antara peserta didik sebagai individu dan kekuatan makro masyarakat, budaya, dan politik yang tengah terjadi. Buku teks dikonseptualisasikan sebagai peninggalan dari sistem budaya yang dinamis, yang tentu menjadi sumber wawasan yang kaya mengenai penelitian pendidikan.

Dalam pendidikan konteks yang tertulis dalam buku teks terus berubah dan tunduk pada ideologi yang menguasainya. Dengan menelaah kontruksi yang dibangun pada buku teks sejarah, dapat ditemukan bagaimana pendidikan membentuk dan dibentuk oleh dinamika budaya politik. Begitu pun dengan yang terjadi pada masa Orde Lama, sebagai pemerintahan yang baru mendirikan negara, perlu ada suatu upaya untuk memberikan landasan kenegaraan seperti menanamkan identitas nasional kepada bangsa yang baru merdeka itu.

Kemudian untuk mengetahui sejauh mana usaha yang telah dilakukan pemerintahan Orde Lama adalah dengan menengok kembali catatan yang ditinggalkan pada buku teks yang diterbitkan pada masa tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, istilah Orde Lama mengacu pada periode pemerintahan Presiden Soekarno. Meskipun penggunaan istilah ini telah menjadi polemik di kalangan akademisi sejarah, penulis berpendapat bahwa penggunaan istilah tersebut sesuai untuk merujuk pada masa pemerintahan Soekarno. Alasannya adalah bahwa selama periode tersebut, Indonesia berada di bawah kepemimpinan satu rezim yang sama. Perspektif ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan Rianto (2021, hlm. 50-51) yang mengemukakan pendapat bahwa meski terjadi beberapa kali perubahan sistem pemerintahan dalam kurun waktu 1945-1966, namun hal tersebut tidak merubah fakta bahwa pemimpin Indonesia pada masa tersebut adalah Soekarno. Begitu pula dengan yang dituliskan oleh Maulana dan Absari (2023, hlm. 140) yang menjelaskan bahwa istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan perbedaan dalam dinamika politik antara masa pemerintahan Soekarno dan masa pemerintahan Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun. Oleh karena itu, penggunaan istilah Orde Lama mampu dengan efektif berperan sebagai penanda tahun politik dari presiden pertama Indonesia.

Berdasarkan pada uraian di atas, dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana pemerintahan pada periode tersebut merekonstruksi sejarah yang akan dijadikan sebagai pijakan identitas nasional. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pemerintahan Orde Lama menarasikan ingatan kolektif melalui buku teks sejarah agar sesuai dengan visi mereka terkait dengan pengembangan nasionalisme dalam dunia pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian adalah “Bagaimana perkembangan konten materi dalam penulisan buku teks sejarah pada masa Orde Lama 1957-1965.” Untuk memusatkan perhatian pada

permasalahan tersebut, maka dijabarkan beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tujuan pendidikan pada masa Orde Lama?
2. Apa tema yang dibahas dalam buku teks sejarah yang digunakan pada di masa Orde Lama?
3. Bagaimana materi dalam buku teks sejarah Orde Lama dinarasikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, secara garis besar penelitian ini ingin mengetahui lebih jauh bagaimana perkembangan konten materi yang digunakan di sekolah-sekolah pada masa Orde Lama antara tahun 1957-1965 yang mana mulai terjadi perubahan penulisan sejarah dari yang sebelumnya bersifat neerlandosentris menjadi indonesiasentris. Adapaun tujuan yang dikehendaki penulis antara lain:

1. Menjelaskan tujuan pendidikan nasional pada masa Orde Lama,
2. Menjelaskan tema materi yang dibahas dalam buku teks pelajaran sejarah yang digunakan pada masa Orde Lama,
3. Menganalisis pendekatan historiografi yang digunakan dalam buku teks pelajaran sejarah Orde Lama.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai perkembangan sejarah historiografi di Indonesia, tepatnya tentang sejarah yang tertulis pada buku-buku teks yang digunakan di sekolah pada masa Orde Lama. Adapun secara khusus penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Memperkaya pengetahuan akan perkembangan sejarah historiografi di Indonesia terutama pada awal pemerintahan pasca kemerdekaan,
2. Mengetahui keterkaitan antara kondisi sosial-politik suatu negara terhadap penyampaian sejarah yang dituliskan pada buku teks resmi di lingkup pendidikan,

3. Mengetahui perkembangan konten materi yang terdapat pada buku-buku teks sejarah di sekolah setelah dilakukan dekolonisasi sejarah,
4. Sebagai kegunaan praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh pengambil kebijakan dalam menentukan strategi pendidikan yang digunakan pada kurikulum sekolah dan sebagai perluasan materi bagi pengajar sejarah di sekolah.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi, disesuaikan dengan apa yang telah ditentukan dalam Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia yang terdiri atas beberapa unsur, antara lain:

Dalam Bab I Pendahuluan memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada subbab latar belakang penelitian menguraikan secara singkat mengenai kondisi sosial-politik Indonesia pada awal kemerdekaan dan pengaruhnya terhadap kebijakan pendidikan di masa tersebut. Selain itu, dituliskan juga alasan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Kemudian dalam subbab rumusan masalah, menguraikan permasalahan utama yang diangkat juga batasan masalah yang akan dikaji oleh penulis. Dalam tujuan penelitian dan manfaat penelitian diuraikan apa saja hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh penulis. Pada subbab terakhir, penulis memaparkan struktur organisasi yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan karya tulis ini.

Bab II Kajian Kepustakaan, menjelaskan teori serta konsep yang dikutip dari berbagai sumber seperti buku, buku elektronik (*e-book*), jurnal, dan internet sebagai bahan referensi yang mendukung penulis meneliti perkembangan historiografi dalam buku teks yang digunakan oleh sekolah-sekolah pada masa Orde Lama. Oleh karena itu, dalam kajian kepustakaan akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan buku teks dan paradigma pendidikan sejarah. Selain itu, pada bab ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kajian buku teks sejarah yang digunakan di sekolah.

Bab III Metode Penelitian, menguraikan secara garis besar langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian. Hal yang menjadi kajian penulis adalah perkembangan konten materi dalam buku teks sejarah yang digunakan pada masa Orde Lama. Maka dari itu, bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan alur penelitian yang dilakukan.

Bab IV Temuan dan Pembahasan. Dalam bab ini dimulai dengan mendeskripsikan tentang tujuan pendidikan yang menjadi landasan utama dalam penulisan sejarah pada buku-buku teks sejarah masa Orde Lama. Selanjutnya penulis akan memaparkan analisis hasil penelitian terkait perkembangan isi konten materi yang terdapat dalam buku teks sejarah masa Orde Lama.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, menjelaskan kesimpulan dari hasil temuan yang menjadi kajian penulis. Dimulai dari memaparkan secara singkat kondisi yang mempengaruhi serta tujuan pendidikan masa Orde Lama, dan dilanjutkan dengan kesimpulan dari perkembangan konten materi yang termuat dalam buku teks sejarah yang digunakan pada masa Orde Lama. Dalam bab ini pula akan dituliskan saran dan rekomendasi dari penulis yang diajukan kepada berbagai pihak terkait seperti pendidik, penulis dan penerbit buku teks pelajaran sejarah, serta peneliti selanjutnya untuk mengembangkan hasil kajian yang telah penulis lakukan.